



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BANK INDONESIA (BI)
UNIT KERJA : BANK INDONESIA INSTITUTE

I. DATA PRIBADI

1. Nama : CLARITA LIGAYA ISKANDAR
2. Jabatan : KEPALA GRUP
3. NHK : 260797

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	17.985.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 153 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI	Rp. 4.900.000.000	
2. Tanah dan Bangunan Seluas 235 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI	Rp. 5.500.000.000	
3. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI	Rp. 4.500.000.000	
4. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI	Rp. 2.510.000.000	
5. Bangunan Seluas 40 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI	Rp. 575.000.000	
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	1.190.000.000
1. MOBIL, MG MG 5 GT Tahun 2023, HASIL SENDIRI	Rp. 290.000.000	
2. MOBIL, WULING BINGOU Tahun 2024, HASIL SENDIRI	Rp. 300.000.000	
3. MOBIL, BYD SEAL Tahun 2024, HASIL SENDIRI	Rp. 600.000.000	
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	1.063.800.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	2.405.200.393
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.963.834.663
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----



Sub Total	Rp.	24.607.835.056
III. HUTANG	Rp.	898.857.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	23.708.978.056

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.